BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi yang terlihat pada perusahaan yang berkembang saat ini lebih banyak berorientasi pada pelaporan keuangan yang ditujukan untuk membuat investor tertarik menanamkan modal. Hal ini membuat banyak perusahaan hanya fokus untuk membuat laporan keuangan yang mencerminkan laba dan asset yang baik. Untuk memenuhi penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan laba dan asset yang baik, tidak jarang perusahaan melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang ada sehingga pada akhirnya alam yang menjadi korban bagi tujuan perusahaan untuk mendapatkan nilai yang baik di mata investor.

Akibat dari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan secara terus menerus, maka dampak negatif seperti kerusakan pada lingkungan dan kesenjangan sosial akan terjadi. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka pada akhirnya perekonomian Indonesia akan hancur seiring dengan hancurnya alam dan lingkungan akibat perbuatan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Namun tidak semua perusahaan berdiam diri melihat eksploitasi berlebihan terhadap alam dan lingkungan,

beberapa perusahaan sudah memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap alam dan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan terhadap alam dan lingkungan ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan sekedar trend sosial saja, namun merupakan sinergi dari upaya yang berkelanjutan untuk menginformasi program-program sosial demi menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan melibatkan para pelaku pembangunan untuk bekerjasama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang tidak dapat diatasi oleh sepihak atau satu organisasi saja, melainkan membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini karena permasalahan lingkungan hidup berkaitan dengan persoalan-persoalan lain seperti kemiskinan, *good corporate governance*, ekonomi, dan sosial.

Corporate Social Responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan di dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007 (Kusumadilaga, 2010). Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki tujuan menarik loyalitas konsumen sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya akan meningkatkan laba dan nilai perusahaan di mata investor.

Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Semakin meningkatnya nilai perusahaan maka akan semakin baik untuk perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan juga memberikan kemakmuran kepada pemegang saham, dengan demikian pemegang saham akan meningkatkan investasinya bagi perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Menurut Permanassari (2010), dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah (1) konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (*outsider ownership concentration*) dan (2) kepemilikan perusahaan oleh manajemen (*management ownership*).

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (*agency cost*). Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Permanasari, 2010). Dalam penelitian ini, hanya kepemilikan saham oleh manajemen saja yang akan digunakan untuk mengurangi *agency cost*. Hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan akan diperkuat oleh kepemilikan manajerial karena semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri (Gray et al. 1998 dalam Rahayu, 2010). Dengan kepemilikan saham oleh manajerial, manajemen dalam perusahaan akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan untuk pemegang saham dan dirinya sendiri.

Menurut Morck et al., dan Mc Connel dalam Permanasari (2010), secara empiris mengeksplorasi hubungan antara struktur kepemilikan dan nilai perusahaan yang diproksi dengan nilai Tobin's Q menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi nilai perusahaan. Begitu pula Jensen and Meckling (1976) menunjukkan struktur kepemilikan mempengaruhi nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kepemilikan manajerial dijadikan variabel independen yang langsung mempengaruhi nilai perusahaan karena tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dan kepemilikan saham oleh manajerial akan meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul “ **Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan.**”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan.
2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat mengetahui dan menerapkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan, serta memiliki pandangan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan.
2. Bagi investor, agar mempunyai bahan pertimbangan lain untuk menilai perusahaan sebelum melakukan investasi.
3. Bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui hak-hak yang seharusnya diperoleh dari perusahaan yang memakai sumber daya alam dan lingkungan dalam kelangsungan usaha.